PENGARUH KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KETIDAKPATUHAN PADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN SESUAI REKOMENDASI TERHADAP PERINGKAT DAN STATUS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Skripsi Oleh :

KOMANG MILA DEWI

01031181621057

Jurusan Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2020

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KETIDAKPATUHAN PADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN SESUAI REKOMENDASI TERHADAP PERINGKAT DAN STATUS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Disusun Oleh :

Nama : Komang Mila Dewi

Nim : 01031181621057

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan **Dosen Pembimbing**

Ketua

Tanggal: 09-03-2020 **Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak., CA**
NIP. 19640903 199403 2 001

Anggota

Tanggal: 08-03-2020 **Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak., CA**
NIP 19771016 201504 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KETIDAKPATUHAN PADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN SESUAI REKOMENDASI TERHADAP PERINGKAT DAN STATUS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Disusun oleh :
Nama : Komang Mila Dewi
Nim : 01031181621057
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 02 Juni 2020 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Indralaya, 22 Juni 2020

Ketua

Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19640903 199403 2 001

Anggota

Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19771016 201504 1 002

Anggota

Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19670701 199203 2 003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP 19730317 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Komang Mila Dewi
Nim	: 01031181621057
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian	: Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang bejudul:

"Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan Pada Ketentuan Perundang-Undangan, dan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Sesuai Rekomendasi Terhadap Peringkat dan Status Penyelenggaraan Pemerintah Daerah".

Pembimbing:

Ketua	: Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak., CA
Anggota	: Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak., CA
Tanggal Ujian	: 02 Juni 2020

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut gelar predikat dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 22 Juni 2020

Penulis Pernyataaan

METERAI TEMPEL
4657CAHF527664844
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Komang Mila Dewi
NIM. 01031181621057

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Cita-cita yang tinggi memang bukan kunci kesuksesan, tapi rahasia dari orang sukses adalah memiliki cita-cita yang tinggi". (Susi Pudjiastuti)

"Bekerja keras dan bersikap baiklah. Hal luar biasa akan terjadi". (Conan O'Brien)

"Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun". (Abigail Adams)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

- Tuhan YME
- Ayah Ibu Tercinta
- Ayuk dan Adikku
- Seluruh keluarga besarku
- Teman-temanku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada TUHAN YME atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul "Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan pada Ketentuan Perundang-Undangan, dan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Sesuai Rekomendasi Terhadap Peringkat dan Status Penyelenggaraan Pemerintah Daerah".

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Skripsi ini membahas mengenai pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan, dan tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah. Selama penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Namun kendala tersebut dapat diatasi berkat doa, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan baik dalam penyusunan maupun penyajiannya. Selanjutnya penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan penulis menerima kritik serta saran yang bersifat membangun guna perbaikan selanjutnya.

Indralaya, 22 Juni 2020

Penulis

Komang Mila Dewi

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. TUHAN YME, yang selalu memberikan karunia-Nya dan petunjuk.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
3. Bapak **Prof. Dr. Mohd Adam, S.E, M.E** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan Ibu **Dr. E. Yusnaini, S.E., M. Si., Ak** selaku Sekretaris jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu **Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu dan Bapak luangkan, kesabaran yang luar biasa, semua motivasi, wejangan, kritik dan saran, doa serta ilmu-ilmu baru yang senantiasa Ibu dan Bapakberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh dosen penguji seminar proposal skripsi dan ujian komprehensif yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ibu **Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan bagi penulis dari semester satu hingga penulis menyelesaikan skripsi.
8. Bapak **Abdul Rohman, S.E., M.Si** Selaku Dosen Akuntansi Sektor Publik yang senantiasa membantu, memberikan nasehat dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis menjalankan perkuliahan.
10. Seluruh Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
11. Ibu dan Bapakku tersayang, terima kasih yang tak terhingga atas cinta, kasih, sayang, doa, dukungan, nasihat, motivasi, perhatian dan segalanya. Semoga Ibu dan Bapak selalu diberi kesehatan oleh Tuhan YME.
12. Ayuk dan adik-adikku, terima kasih karena telah menjadi pendorong dan memberi motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat terbaikku sejak kecil: Eka dan Rani serta sahabatku selama kuliah yang senantiasa membantu; Rahma, Halimah, Maya, Dian, Yuyun, Selpa. Serta sahabat-sahabatku yang lain Yolan, Nadia, Rina, Erna, Lisma, Aik, Terima kasih atas segalanya semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
14. Komang Purnawan, terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah.
15. Teman seperjuangan satu bimbingan, terima kasih telah membersamai perjuangan ini, kawan. *See you on top!*

16. Teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2016, terima kasih atas kebersamaan yang indah selama perkuliahan.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama	: Komang Mila Dewi
NIM	: 01031181621057
Jurusan	: Akuntansi
Mata Kuliah	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi	: Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan pada Ketentuan Perundang-Undangan, dan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Sesuai Rekomendasi Terhadap Peringkat dan Status Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Telah kami periksa cara penulisan, *grammer*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setujui untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Indralaya, 22 Juni 2020

Ketua	Anggota
Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak., CA	Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19771016 201504 1 002	NIP. 19640903 199403 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP 19730317 199703 1 002

ABSTRAK

PENGARUH KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KETIDAKPATUHAN PADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN SESUAI REKOMENDASI TERHADAP PERINGKAT DAN STATUS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Oleh:
Komang Mila Dewi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan, dan tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota Sumatera Selatan dengan sampelnya sebanyak 4 pemerintah kota dan 8 pemerintah kabupaten selama 5 tahun. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari IHPS I dan II dari BPK Tahun 2013-2017 dan hasil penetapan peringkat dan status pemerintah daerah Tahun 2013-2017 yang berasal dari Kepmendagri. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara variabel ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan dan tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kelemahan sistem pengendalian intern, Ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan, Tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi, Peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah.

Ketua	Anggota
Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak., CA	Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19640903 199403 2 001	NIP. 19771016 201504 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317 199703 1 002

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF WEAKNESSES IN THE INTERNAL CONTROL SYSTEM, NON-COMPLIANCE WITH STATUTORY PROVISIONS, AND FOLLOW-UP ON EXAMINATION FINDINGS IN ACCORDANCE WITH RECOMMENDATIONS ON RANKING AND STATUS OF LOCAL GOVERNMENT IMPLEMENTATION.

By:
Komang Mila Dewi

This study aimed to examine the influence of weaknesses in the internal control system, non-compliance with statutory provisions, and follow-up on examination findings in accordance with recommendations on the ranking and status of local government implementation. The population in this study was the regency/city government of South Sumatra with a sample of 4 city's governments and 8 regency governments for 5 years. The data used were secondary data from IHPS I and II from BPK 2013-2017 and the results of ranking and status of local governments in 2013-2017 from the Ministry of Home Affairs. The data analysis techniques which were used were descriptive statistics and multiple linear regression. The results of this study indicated that the weakness of the internal control system partially had a significant negative influence on the ranking and status of local government implementation. While the non-compliance variable in the statutory provisions and follow-up on examination findings in accordance with recommendations did not significantly influence the ranking and status of local government implementation.

Keywords: Weaknesses in the internal control system, Non-compliance with statutory provisions, Follow-up of audit findings according to recommendations, ranking and status of regional government administration.

Advisor	*Member*
Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak., CA	Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak.,CA
NIP. 19640903 199403 2 001	NIP. 19771016 201504 1 002

Acknowledge by,
Head of Accounting Department

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317 199703 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Komang Mila Dewi

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Oku Timur, 20 Maret 1998

Agama : Hindu

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah : Batumarta 7-F dusun Taman Bali, RT/RW 001/007
Kel. Wanabakti, Kec. Madang Suku III Kab. OKUT

Alamat Email : Komangmiladewi@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2003-2004 : TK Binaria 2 Batumarta 7

Tahun 2004-2010 : SD Negeri 2 Batumarta 7

Tahun 2010-2013 : SMP Negeri 1 Madang Suku III

Tahun 2013-2016 : SMA Negeri 2 OKU

Tahun 2016-2020 : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

PENGALAMAN ORGANISASI

2016-2020 : Anggota KMHDI komisariat Unsri Indralaya

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK ix
ABSTRAK x
***ABSTRACT* ..... xi**
RIWAYAT HIDUP xii
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR GAMBAR xvii
DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 8
1.5 Sistematika penulisan 10

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN 12
2.1 Landasan Teori 12
2.1.1 Teori Keagenan 12
2.1.2 Peringkat dan Status Pemerintah Daerah 13
2.1.3 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 14
2.1.4 Ketidakpatuhan pada Ketentuan Perundang-Undangan 15
2.1.5 Tindak Lanjut Temuan Sesuai Rekomendasi 16
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 17

2.3 Alur Pikir 23
2.4 Hipotesis 24
2.4.1 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dengan Peringkat dan Status Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 24
2.4.2 Ketidakpatuhan Pada Ketentuan Perundang-Undangan dengan Peringkat dan Status Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 26
2.4.3 Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Sesuai Rekomendasi dengan Peringkat dan Status Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 27

BAB III METODE PENELITIAN 29
3.1 Ruang Lingkup Penelitian 29
3.2 Rancangan Penelitian 29
3.3 Jenis dan Sumber Data 30
3.4 Teknik Pengumpulan Data 30
3.5 Populasi dan Sampel 30
3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 32
3.6.1 Variabel Dependen 32
3.6.2 Variabel Independen 32
3.6.2.1 Kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah 32
3.6.2.2 Ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-Undangan 33
3.6.2.3 Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Sesuai Rekomendasi 33
3.7 Teknik Analisis Data 35
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 35
3.7.2 Uji Asumsi Klasik 35
3.7.2.1 Uji Normalitas 36
3.7.2.2 Uji Multikolinieritas 36
3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas 37
3.7.3 Pengujian Hipotesis 37
3.7.3.1 Persamaan Regresi 37

3.7.3.2 Uji Parsial (Uji t) 39
3.7.3.3 Koefisien Determinasi 39

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 40
4.1 Analisis Data 40
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif 40
4.1.2 Analisis Asumsi Klasik 42
4.1.2.1 Analisis Uji Normalitas Data 43
4.1.2.2 Analisis Uji Multikolinieritas 44
4.1.2.3 Analisis Uji Heteroskedastisitas 45

4.1.3 Analisis Uji Hipotesis 48
4.1.3.1 Analisis Regresi Berganda 48
4.1.3.2 Uji Parsial (Uji t) 50
4.1.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2) 52
4.2 Pembahasan 53
4.2.1 Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern terhadap Peringkat dan Status Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 53
4.2.2 Pengaruh Ketidakpatuhan Pada Ketentuan Perundang-Undangan terhadap Peringkat dan Status Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 55
4.2.3 Pengaruh Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Sesuai Rekomendasi terhadap Peringkat dan Status Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 61
5.1 Kesimpulan 61
5.2 Keterbatasan Penelitian 61
5.3 Saran Penelitian 62

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN-LAMPIRAN 68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peringkat dan Status Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 17
Tabel 3.1 Proses Pengambilan Sampel 31
Tabel 3.2 Definisi Operasional dan pengukuran Variabel 34
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif 40
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data 44
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas 45
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 47
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Berganda 48
Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial (Uji t) 51
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Hipotesis 23
Gambar 4.1 Grafik Normal P-Plot 43
Gambar 4.2 Grafik Scatter Plot 46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 68
Lampiran 2. Daftar Nama Pemerintah Daerah Yang Menjadi Sampel Penelitian 69
Lampiran 3. Tabulasi Keseluruhan Data Penelitian..... 70
Lampiran 4. Daftar Peringkat Pemerintah Daerah 73
Lampiran 5. Daftar Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern..... 74
Lampiran 6. Daftar Temuan Ketidakpatuhan Pada Ketentuan Perundang-Undangan..... 75
Lampiran 7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan..... 76
Lampiran 8. Hasil Output Spss Versi 26..... 79

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pemerintah daerah diharuskan mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengelola sumber daya daerah secara efisiensi dan efektivitas, menyediakan pelayanan umum, meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan keunggulan yang terdapat pada daerah tersebut dan menciptakan ruang untuk masyarakat ikut berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Heriningsih, 2015).

Dalam strategi pemberdayaan pemerintah daerah perbaikan kinerja pemerintah daerah menduduki posisi yang sangat penting untuk pelaksanaan otonomi daerah serta mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Dimana perbaikan tersebut mengharuskan kepala daerah untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan juga memberikan pertanggungjawaban dalam akuntabilitas keuangan guna mencapai good governance (Habibi, 2015).

Pemerintah dan masyarakat menilai permasalahan kinerja pemerintah telah menjadi perhatian serius. Salah satu agenda prioritas reformasi birokrasi pemerintah yaitu memperbaiki kinerja pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat, dan pemerintah diharapkan dapat mengukur sejauh mana dampak dan manfaat dari hasil kinerjanya yang telah dirasakan oleh masyarakat(Meiliana, 2011).

Kinerja pemerintah daerah tersebut dapat dinilai melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan dilengkapi dengan Permendagri Nomor 73 tahun 2009 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu bentuk evaluasi pemerintah yaitu dengan mencermati Nawacita Presiden Jokowi-Jusuf Kalla diawal kepemimpinannya: "Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" (Hariyanti, 2018).

Kemendagri dengan program "good and clean government" melakukan evaluasi atas prestasi dan kinerja pemerintah daerah secara nasional. Hasil evaluasi dan penilaian kinerja pemerintah daerah tersebut ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Kepmendagri tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional. Berbagai sumber menyatakan bahwa pengukuran kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan (Btarbutar, 2018).

Adapun fenomena yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penetapan

peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana peringkat pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan, dimana tabel 1berikut memberikan data tersebut.

Tabel 1.1 Peringkat dan Status Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No.	Nama Pemda	2014		2015		2016		2017	
		status	peringkat	status	peringkat	status	peringkat	status	Peringkat
1	Prov. Sumsel	2,6802 (T)	9	2,6885 (T)	15	2,8200 (T)	17	2,8760 (T)	13
2	Kab. OKI	3,0303 (T)	98	3,1362 (ST)	88	3,1356 (ST)	112	2,9652 (T)	130
3	Kab. Muara Enim	30.685 (ST)	88	3,1114 (ST)	97	3,1195 (ST)	122	2,9910 (T)	115
4	Kab. Musi Banyuasin	30.727 (ST)	86	-	-	3,0575 (ST)	157	2,8552 (T)	200
5	Kab. Musi Rawas	30.680 (ST)	90	3,1092 (ST)	98	3,1996 (ST)	94	2,9410 (T)	146
6	Kab. Lahat	30.799 (ST)	83	3,0835 (ST)	107	3,0574(ST)	158	2,8902 (T)	176
7	Kab. OI	28.625 (T)	153	2,9143 (T)	186	3,0434 (ST)	172	2,8794 (T)	184
8	Kab. OKUT	29.105 (T)	137	2,8944 (T)	193	2,8131(T)	275	2,7045 (T)	283
9	Kab. OKU	24.887 (T)	257	2,8871 (T)	200	2,9876 (T)	201	2,8911 (T)	175
10	Kab. OKUS	27.398 (T)	189	2,8824 (T)	202	2,7696 (T)	290	2,7045 (T)	280
11	Kab. Banyuasin	30.727 (ST)	86	-	-	2,9786 (T)	206	2,8655 (T)	191
12	Kab. Empat Lawang	26.623 (T)	212	-	-	2,8922 (T)	242	2,8034 (T)	230

13	Kota Lubuklinggau	29.331 (T)	26	3,0670 (ST)	32	2,9761 (T)	66	2,7623 (T)	80
14	Kota Prabumulih	25.976 (T)	61	2,9593 (T)	54	3,0161 (ST)	57	2,9633 (T)	57
15	Kota Palembang	26.894 (T)	56	2,9114 (T)	57	3,0768 (ST)	45	3,0427 (T)	45
16	Kota Pagar Alam	26.133 (T)	59	2,6741 (T)	74	2,9768 (T)	65	2,8556 (T)	65

Sumber :Kepmendagri Nomor 800-35 Tahun 2016, Kepmendagri Nomor 120-10421 Tahun 2016, Kepmendagri Nomor 100-53 Tahun 2018, Kepmendagri Nomor 118-8840 Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Sumatera Selatan terus menerus menunjukkan kinerja dengan status yang tinggi, namun untuk peringkat mengalami penurunan. Penurunan peringkat kinerja pemerintah daerah kabupaten\kota berbanding lurus dengan penurunan peringkat kinerja pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Penurunan peringkatini menunjukkan bahwa masih rendahnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten/kota Sumatera Selatan. Dari tahun 2014 sampai dengan 2017 penurunan peringkat terjadi pada kabupaten/kota diantaranya kabupaten OKI awalnya berada pada peringkat 98 menjadi peringkat 130, kabupaten Musi Banyuasin peringkat 86 menjadi peringkat 200, Kabupaten Musi Rawas peringkat 90 menjadi peringkat 146, kabupaten Lahat peringkat 83 menjadi peringkat 176, kabupaten Ogan Ilir peringkat 153 menjadi peringkat 184, kabupaten OKUT peringkat 137 menjadi peringkat 283, untuk kota Lubuk Linggau dari peringkat 26 menjadi peringkat 80.

Salah satu cara agar terciptanya pemerintahan daerah yang baik yaitu dengan adanya pemeriksaan keuangan oleh BPK. Hasil pemeriksaan oleh BPK terkait pengelolaan keuangan daerah nantinya akan dilaporkan pada DPRD. Hasil pemeriksaan tersebut berupa temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi.

Adanya sistem pengendalian intern yang efektif diharapkan dapat berpengaruh terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja pemerintah daerah dilakukan agar setiap daerah mampu meningkatkan kinerjanya sehingga diharapkan menjadi bahan penilaian yang lebih baik untuk kedepannya.

Selain itu auditor juga perlu melakukan pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan karena dalam laporan keuangan tidak hanya meyakini bahwa telah disajikan secara benar dan sesuai, namun perlu memperhatikan relevansinya terhadap ketentuan perundang-undangan. Apabila pemerintah daerah tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah akan kurang produktif dalam kinerjanya sehingga akan mempengaruhi hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Arifianti, Payamta, & Sutaryo, 2013).

Suatu pemeriksaan dan penilaian dapat dikatakan efektif bukan hanya karena perencanaan yang baik, tetapi ditentukan juga karena auditor internal mengajukan rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan (Arifianti, Payamta, & Sutaryo,2013).

Dalam masalah ini hubungan yang baik antara pihak manajemen dan auditor sangat dibutuhkan. Pihak auditor harus bisa memberikan suatu rekomendasi yang tepat dan juga realistis kepada pihak manajemen, dan pihak manajemen diharuskan bisa melaksanakan rekomendasi yang diajukan oleh auditor dengan tepat sesuai dengan apa yang telah direkomendasikan sebelumnya. Dengan adanya rekomendasi tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat menindak lanjut temuan audit dan meningkatkan kinerjanya sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik.

Secara umum belum banyak penelitian tentang peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah karena kebanyakan peneliti lebih tertarik untuk meneliti variabel kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Arifianti, Payamta, & Sutaryo (2013), Hendrianto, Fauziah, & Ethika (2015), dan Daud & Rohman (2018). Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah tahun penelitian, jumlah sampel, variabel yang digunakan dan juga wilayah yang akan diteliti.

Penelitan sebelumnya terkait dengan peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh (Daud & Rohman, 2018) meneliti mengenai analisis pengaruh diskresi akrual dan kemampuan keuangan daerah terhadap peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasilnya menunjukkan secara parsial diskresi akrual berpengaruh positif signifikan dan kemampuan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penelitian lain terkait kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh Hendrianto, Fauziah, & Ethika (2015) tentang pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, hasilnya penelitian menunjukkan bahwakelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, tindak lanjut temuan sesuai rekomendasi dan fungsi pengawasan DPRD tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya belum mengkaji lebih jauh mengenai lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah daerah, ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan, dan tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi sebagai faktor yang dapat mempengaruhi peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah ?

2. Apakah ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan berpengaruh terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah ?
3. Apakah tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi berpengaruh terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas ,maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian dapat memperluas literatur tentang fenomena pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan, dan tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah, memberikan

pengetahuan, wawasan dan pengalaman serta dapat digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Peneliti

Sarana untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam menguji secara empiris pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan dan tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah.

b. Bagi Pemerintahan daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan dari hasil audit BPK atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

c. Bagi Fakultas Ekonomi

Sebagai referensi keilmuan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan,dan tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai informasi dan dokumentasi data penelitian yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dalam lima bab, dimana tiap-tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan kerangka penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini menyajikan teori yang relevan dengan topik skripsi yang akan dijadikan landasan dalam penulisan skripsi, sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian sehingga mendukung proses penulisan skripsi, kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis yang didalamnya membahas mengenai ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan, dan tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan dan saran yang bermanfaat bagi berbagai pihak untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arianto, H., Heriyanto, M., & Karneli, O. (2018). KSPI, KTPPU, TLTRHP, dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Administraasi Negara*, *15*(1), 13–22.

Arifianti, H., Payamta, & Sutaryo. (2013). Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVI*, *3*(2), 2477–2505.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 2013. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013*. Retrieved from http://bpk.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 2014. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014.* Retrieved from http://bpk.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015*. Retrieved from http://bpk.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016*. Retrieved from http://bpk.go.id

Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia (BPK RI) 2017. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1I Tahun 2017*. Retrieved from http://bpk.go.id

Btarbutar, D. M. (2018). No Title. Retrieved from www.kabarindonesia.com

Daud, R., & Rohman, A. (2018). Analisis Pengaruh Diskresi Akrual dan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, *11*(2), 1–20.

Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badab Penerbit UNDIP.

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2016). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Semarang: Yoga Pratama.

Habibi, M. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *28*(2), 117–124.

Hariyanti, P. (2018). No Title. Retrieved from https://nasionaal.sindonews.com/read/1300743/15/mendagri-otonomi-daerah-syarat-utama-wujudkan-nawa-cita-1524658647/10

Harumiati, Y., & Payamta. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, *3*(2), 75–87.

Hendrianto, Fauziah, P., & Ethika. (2015). Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, *1*(2), 1–15.

Heriningsih, S. (2015). Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Dan Tingkat Korupsi Dianalisis Dari Opini Auditor. *Univesity Research Colloquium*, 86–95.

Kiswanto, & Fatmawati, D. (2019). Determinan Kinerja Pemerintah Daerah : UKuran Pemda, Leverage, Temuan Audit dan Tindak Lanjutnya. *Jurnal Kajian Akuntansi*, *3*(1), 44–54.

Maabuat, J. S., Morasa, J., & Saerang, D. P. E. (2016). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan pada Ketentuan Perundang-Undangan dan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Opini BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Journal Accountability*, *5*(2), 52–62.

Meiliana. (2011). Menyongsong Reformasi Birokrasi Tahap Kedua Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik No Title. *Jurnal Borneo Administrator*, *7*(1), 24–44.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10421 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015 (2016).

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800-35 Tahun 2016 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2014 (2016).

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Secara Nasional (2018).

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118-8840 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2017 (2018).

Mimelientesa, I., & Suryati. (2017). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan pada Ketentuan Perundang-Undangan, Opini Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2011-2014. *KURS*, *2*(2), 197–209.

Mugiarty, L., Ritchi, H., & Pratama, A. (2018). Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Negara (Survey pada Direktorat Jenderal SUmber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Jurnal Kuntansi Maranatha*, *10*(2), 261–174.

Munawar, Nadirsyah, & Abdullah Syukriy. (2016). Pengaruh Jumlah Temuan Audit atas SPI dan Jumlah Temuan Audit Atas Kepatuhan terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, *5*(2), 57–67.

Netty, N., Fahmi, R., & Kadir. (2019). Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal InFestasi*, *15*(1), 67–82.

Nugraha, B. A. (2015). Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(3), 1–20.

Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pongoliu, R. R., Saerang, D., & Manossoh, H. (2017). Analisis Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ekonomi*, *2*(1), 1–10.

Purnawan, W. O., & Sudarno. (2017). Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Dan Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, *6*(1), 1–9.

Ramandei, P. (2009). Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem

Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura). *Jurnal Fakultas Ekonomi*, *1*(2), 1–22.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (2004).

Safitri, N. L. K. S. A., & Darsono. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Temuan Kepatuhan terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, *5*(1), 1–12.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Seskar, M. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Pengawasan Masyarakat Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan di Sumatera Barat Tahun 2011-2014). *Jurnal Fakultas Ekonomi*, *11*(1).

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sulastri, M. J., Jenny, M., & E., S. D. P. (2016). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan dan penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Opini Bpk-Ri Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, *1*(2), 52–62.

Widagdo, A. K., & Badrul, M. M. (2017). Profil Kepala Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *20*(2), 303–330.

Widodo, O. P., & Sudarno. (2017). Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, *6*(1), 1–9.